



**PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) DI DESA SIDOREJO  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2015**

*Youth Participation in Village Development Planning Meeting (Musrenbang  
Desa) in Sidorejo Village District of Rowokangkung Lumajang Regency  
in 2015*

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Dwi Sandy Aprilian  
NIM 110910201042**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) DI DESA SIDOREJO  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2015**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

**Dwi Sandy Aprilian  
NIM 110910201042**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Ngadmadi dan Ibunda Hariyati, serta keluarga yang selalu berdoa dan memberikan dukungan yang sangat berarti bagi saya.
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Almamater tercinta, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

## MOTTO

Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu.  
Barangsiapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu.  
Barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu.

(Imam Asy-Syafi'i)<sup>1</sup>

Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncang dunia.

(Ir. Soekarno)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Asy-Syafi'i dari [www.rumaysho.com](http://www.rumaysho.com)

<sup>2</sup> Ir. Soekarno dari [www.akinini.com](http://www.akinini.com)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dwi Sandy Aprilian

NIM : 110910201042

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Desember 2015

Yang menyatakan,

Dwi Sandy Aprilian

NIM 110910201042

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI PEMUDA DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) DI DESA SIDOREJO  
KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2015**

*Youth Participation in Village Development Planning Meeting (Musrenbang  
Desa) in Sidorejo Village District of Rowokangkung Lumajang Regency  
in 2015*

Oleh

**Dwi Sandy Aprilian  
NIM 110910201042**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supranoto, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Kamis, 03 Desember 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Sekretaris

Drs. Anwar, M.Si  
NIP 196306061988021001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si  
NIP 195805101987022001

Anggota Penguji

1. Drs. Supranoto, M.Si (.....)  
NIP 196102131988021001
2. Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si (.....)  
NIP 195607261989021001

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015;** Dwi Sandy Aprilian, 110910201042; 2015; 89 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa setiap perencanaan pembangunan baik di tingkat pemerintahan pusat sampai pemerintahan paling bawah yaitu desa harus melibatkan semua unsur masyarakat. Namun, salah satu unsur masyarakat yang keterlibatannya rendah adalah pemuda. Keterlibatan pemuda dalam pembangunan masih terbatas. Hal ini sangat disayangkan karena keberanian dan kretivitas pemuda sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang, fokus penelitian adalah partisipasi pemuda pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Musrenbang Desa. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui disukusi serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data, dan memverifikasi atau menarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap persiapan Musrenbang Desa, penentuan pemuda yang akan menghadiri musyawarah dusun dilakukan melalui undangan dan ditentukan oleh pemerintah desa. Penggalan gagasan pemuda dilakukan melalui perkumpulan pemuda dan kegiatan olahraga.



Selanjutnya, gagasan pemuda disampaikan pada musyawarah dusun. Dalam forum tersebut, pemuda mempunyai pengaruh terhadap keputusan yang diambil meskipun pada akhirnya beberapa hal masih ditentukan oleh pemerintah desa. Dengan menggunakan teori Arnstein maka partisipasi pemuda pada tahap persiapan Musrenbang Desa berada pada derajat kedua yaitu derajat tanda adanya partisipasi dan terletak pada tangga kelima yaitu penentraman. Sedangkan pada tahap pelaksanaan Musrenbang Desa semua usulan pemuda disampaikan oleh tokoh masyarakat. Namun tidak ada jaminan semua usulan pemuda akan diperhatikan dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Partisipasi pemuda pada tahap ini tetap berada pada derajat kedua namun letak tangga partisipasinya turun menjadi tangga keempat yaitu konsultasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 1) Pemuda perlu dilibatkan dalam semua tahap Musrenbang Desa, baik dalam tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan agar mereka bisa menyampaikan dan memperjuangkan kepentingannya secara langsung kepada pemerintah desa; 2) Seharusnya pemerintah desa tidak hanya melibatkan tokoh masyarakat sebagai perwakilan dusun karena bila hanya melibatkan satu orang maka jumlah tersebut kurang proporsional dan tidak mewakili semua unsur masyarakat; 3) Untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam Musrenbang Desa, seharusnya peserta tidak hanya ditetapkan melalui undangan melainkan dilakukan secara terbuka agar pemuda yang ingin mengikuti Musrenbang Desa dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta.

## **PRAKATA**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, MM., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
4. Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini;
5. Suji S.Sos, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
7. Drs. Heru Subaintoro selaku Kepala Desa Sidorejo, terimakasih telah memberikan ijin penelitian di Desa Sidorejo;

8. Bapak Edi Supriyanto selaku Sekretaris Desa Sidorejo, Bapak Abdul Malik Huda beserta unsur pemerintahan desa lainnya, Joni, Restu dan pemuda lainnya yang sekaligus menjadi informan saya, terimakasih telah memberikan informasi berharga yang dibutuhkan penulis dan meluangkan waktu dalam keperluan hal penelitian ini;
9. Keluarga saya, Ayahanda Ngadmadi, Ibunda Hariyati, Kakak Ika Dian Yuliati, Kakak ipar Lukman Hakim, Keponakan saya Nafiisa Valentina Hakim dan Rahmania Az Zahra Hakim yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi yang sangat berarti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Dessy Purwanti yang telah bersabar dan selalu memberikan doa serta semangat kepada penulis selama ini;
11. Diki, Candra, Lutfi, Udin, Iqbal, Rama, Mas Randi, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan inspirasi, bantuan, dan doa kepada penulis.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna maka kritik dan saran dari berbagai pihak diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 03 Desember 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIBINGAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB 2. KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Pembangunan .....</b>	<b>15</b>
<b>2.2 Perencanaan Pembangunan Desa .....</b>	<b>20</b>
2.2.1 Perencanaan .....	20
2.2.2 Pembangunan Desa .....	21
<b>2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(Musrenbang Desa) .....</b>	<b>23</b>
<b>2.4 Partisipasi .....</b>	<b>24</b>
2.4.1 Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan .....	26
2.4.2 Jenis dan Bentuk Partisipasi.....	27
2.4.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat .....	28
<b>2.5 Partisipasi Pemuda .....</b>	<b>33</b>
2.5.1 Pemuda.....	33
2.5.2 Partisipasi pemuda .....	34
<b>2.6 Kerangka Berpikir Penelitian .....</b>	<b>36</b>

<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 Fokus Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>3.4 Data dan Sumber Data .....</b>	<b>40</b>
<b>3.5 Teknik Pemilihan Informan .....</b>	<b>41</b>
<b>3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
<b>3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data .....</b>	<b>44</b>
<b>3.8 Teknik Analisis Data .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Deskripsi Daerah Penelitian .....</b>	<b>47</b>
4.1.1 Gambaran Umum Desa Sidorejo .....	47
4.1.2 Keadaan Penduduk .....	47
4.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	51
4.1.4 Sarana dan Prasarana .....	52
4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa .....	55
<b>4.2 Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Desa     (Musrenbang Desa) Di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung     Kabupaten Lumajang Tahun 2015 .....</b>	<b>60</b>
4.2.1 Tahap Persiapan .....	61
4.2.2 Tahap Pelaksanaan .....	76
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>89</b>

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia.....	8
Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.....	9
Tabel 1.3 Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang.....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Karakteristik Tiga Paradigma Pembangunan.....	16
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender.....	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	50
Tabel 4.5 Luas Tanah Berdasarkan Statusnya.....	50
Tabel 4.6 Luas Tanah Berdasarkan Penggunaannya.....	50
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut.....	51
Tabel 4.8 Jumlah Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.....	51
Tabel 4.9 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kemiskinan.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Konsep Perencanaan Pembangunan.....	5
Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein.....	30
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	36
Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif.....	46
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Sidorejo.....	55
Gambar 4.2 Partisipasi Pemuda pada Tahap Persiapan Musrenbang Desa di Desa Sidorejo.....	75
Gambar 4.3 Partisipasi Pemuda pada Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa di Desa Sidorejo.....	86
Gambar 4.4 Partisipasi Pemuda dalam Proses Musrenbang Desa di Desa Sidorejo .....	88

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian (Lembaga Penelitian UNEJ)
2. Surat Ijin Penelitian (Bakesbangpol Kabupaten Lumajang)
3. Surat Keterangan Selesai Pelaksanaan Penelitian di Desa Sidorejo
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
8. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang
9. Pedoman Wawancara
10. Dokumentasi Musyawarah Dusun dan Musrenbang Desa
11. Dokumentasi Penelitian
12. Undangan Musyawarah Dusun
13. Undangan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
14. Daftar hadir Musyawarah Dusun
15. Daftar hadir Musrenbang Desa
16. Rekap Musyawarah Dusun Tahun 2014
17. Rencana Kerja Pembangunan Desa Sidorejo Tahun 2015
18. Berita Acara Musrenbang Desa Sidorejo Tahun 2015
19. Notulensi Musrenbang Desa Sidorejo Tahun 2015
20. Surat Keputusan Panitia Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2015
21. Susunan Anggota Panitia Pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2015



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015. Secara umum, pembangunan didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam upaya perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang terencana. Perencanaan dimaksudkan agar kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Agar perubahan yang dilakukan dapat mencapai sasaran dan tujuan maka harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal.

Tjokroamidjojo dalam Januar (2006:28) mengartikan pembangunan sebagai upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu. Dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu usaha masyarakat dalam melakukan perubahan di berbagai bidang kehidupan agar menjadi lebih maju berdasarkan pandangan atau aspirasinya sendiri. Hal tersebut menekankan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja melainkan tanggungjawab semua elemen negara termasuk masyarakat sebagai *stakeholder*.

Korten dalam Muluk (2007:5) menyatakan betapa pentingnya partisipasi dalam berbagai proses pembangunan sehingga pembangunan dapat dijalankan untuk meningkatkan martabat manusia. Sedangkan Burns *et al* dalam Muluk (2007:5) menunjukkan pentingnya partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pemerintahan daerah. Conyers (1994:154) menyebutkan tiga alasan utama mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut.

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan atau perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut;
- 3) Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan.

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, "*participation*" yaitu pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Bornby dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian" yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Masih di dalam buku yang sama, menurut kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Mardikanto dan Soebiato, 2013:81). Dari beberapa definisi di atas, jika dilihat dari konteks pembangunan maka partisipasi dalam pembangunan berarti keikutsertaan atau keterlibatan dalam sebuah proses pembangunan.

Pembangunan dengan cara mengikutsertakan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memanfaatkan potensi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi agar pembangunan yang dihasilkan nantinya akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal itu dilakukan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Jadi, pada akhirnya masyarakat bukanlah obyek yang hanya sebagai penerima program pembangunan melainkan masyarakat sebagai subyek yang melakukan pembangunan itu sendiri.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan karena perencanaan merupakan tahap awal dan dasar dari proses pembangunan. Perencanaan memuat berbagai hal tentang apa yang akan dan harus

dilaksanakan di masa yang akan datang, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrumen yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat 3 menyatakan sebagai berikut.

“SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.”

Dari pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa harus ada keselarasan antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan di tingkat pusat berguna sebagai pedoman perencanaan di tingkat daerah dan perencanaan di tingkat daerah menjadi masukan terhadap perencanaan di tingkat pusat.

Undang-Undang diatas sejalan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur pembangunan di wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kini Undang-Undang tersebut telah berkembang dan pecah menjadi dua, yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah pembangunan yang dilakukan harus berjalan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, sampai kepada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa.

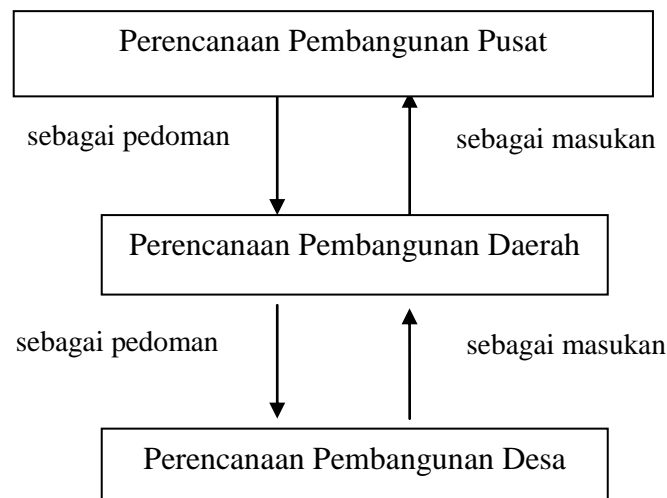
Pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan bangsa karena penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di desa lebih banyak daripada yang bertempat tinggal di kota. Selain itu perbandingan jumlah desa dan kota sangat jauh berbeda. Pada tahun 2013 jumlah penduduk desa adalah 50,2 % dan penduduk kota 49,8% (sumber: <http://revolusidesa.com> diakses pada 17 April 2015 pukul 12.10 WIB).

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan seluruh Indonesia tahun 2013 terdapat 72.944 desa. Sedangkan jumlah kota hanya 514 (sumber: <http://ptkpt.net> yang diakses pada 20 Mei 2015 pukul 06.36 WIB). Dengan besarnya jumlah desa dan penduduknya tersebut memberikan gambaran bahwa pembangunan desa sangatlah penting karena dengan membangun desa sama halnya membangun bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 menyatakan sebagai berikut.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pernyataan tersebut, menjelaskan bahwa desa juga mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal tersebut menandakan bahwa desa diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan inisiatif, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Setiap pembangunan dimulai dari tahap perencanaan, begitu juga dengan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 79 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan desa harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan daerah harus berpedoman kepada perencanaan pembangunan pusat. Sedangkan perencanaan pembangunan dari tingkat bawah berguna sebagai masukan kepada pemerintah di atasnya. Hal ini dimaksudkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan pembangunan ditingkat pusat, daerah dan desa. Dengan menggunakan sistem perencanaan *Top Down* dan *Bottom Up* seperti ini diharapkan pembangunan akan lebih efektif.



Gambar 1.1 Konsep Perencanaan Pembangunan  
Sumber: UU No.25 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2014

Sedangkan tujuan perencanaan pembangunan (Muhi, 2010:7) adalah sebagai berikut.

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Setiap perencanaan pembangunan disusun melalui forum musyawarah, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau biasa disebut Musrenbang, di tingkat desa disebut dengan Musrenbang Desa. Musrenbang Desa adalah sebuah forum musyawarah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang dilaksanakan secara rutin pada waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Hal tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pasal 80 menyatakan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa berguna untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat dan juga bersumber dari APBD. Perencanaan pembangunan desa yang dimaksud dalam pasal ini mewajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pada pasal 116 ayat 1 dan 2 menyebutkan sebagai berikut.

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa di dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang di dalamnya termuat RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah desa wajib dan harus menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Seluruh elemen masyarakat yang dimaksud di sini adalah tokoh masyarakat, kelompok tani, LSM, perempuan, pemuda dan lain sebagainya. Namun pada kenyataannya, keterlibatan organisasi-organisasi sektoral, organisasi kemasyarakatan yang lain, perempuan dan pemuda masih sangat terbatas. (sumber: <http://desaciburial.com> diakses pada tanggal 23 Februari 2014 pukul 05.03 WIB). Dalam penelitian ini, penulis lebih tertarik meneliti tentang keterlibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan dengan penjelasan sebagai berikut.

Dari data sensus tahun 2010, sekitar 25 persen penduduk Indonesia adalah pemuda (sumber: <http://academia.edu> diakses pada tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.00 WIB). Angka ini merupakan potensi besar jika dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Namun sebaliknya, apabila potensi tersebut tidak dikelola dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu untuk memastikan agar potensi pemuda dapat tersalurkan dan menghasilkan manfaat semaksimal mungkin, pemuda perlu dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Keterlibatan ini menjadi penting karena apabila pemuda berada di luar lingkaran proses pembangunan, potensinya cenderung akan menjadi faktor penghambat pembangunan. Apalagi mengingat pemuda merupakan segmen yang memiliki energi besar dan jiwa yang bergejolak, sehingga apabila mereka terpinggirkan biasanya akan mendorong lahirnya masalah-masalah sosial yang dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan.

Kondisi yang terjadi saat ini, seperti yang telah diteliti oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya Staf Ahli Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2012 dan 2013 di beberapa daerah di Indonesia, menunjukkan masih minimnya kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh pemuda untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (sumber: <http://academia.edu> diakses pada tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.08 WIB). Pemuda masih belum memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses-proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan. Posisi pemuda masih diletakkan sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek/pelaku pembangunan.

Hal ini diantaranya disebabkan minimnya komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh pemuda tentang tahapan dan proses pembangunan. Selain itu pihak penyelenggara pemerintahan masih belum memberikan kepercayaan untuk melibatkan pemuda. Pemuda masih dianggap sebagai sumber masalah, bukannya sebagai potensi dan modal utama pembangunan. Hal tersebut bertolak belakang dengan surat edaran bersama Kepala Bappenas dan Mendagri tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 halaman 8, bahwa pemuda harus dilibatkan dalam perencanaan pembangunan.

Menurut data BPS, Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Tepatnya, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua dengan jumlah penduduk paling banyak setelah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi di Indonesia

Provinsi	Penduduk			
	1980	1990	2000	2010
DKI Jakarta	6.503.449	8.259.266	8.389.443	9.607.787
Jawa Barat	27.453.525	35.384.352	35.729.537	43.053.732
Jawa Tengah	25.372.889	25.372.889	31.228.940	32.382.657
DI Yogyakarta	2.750.813	2.913.054	3.122.268	3.457.491
Jawa Timur	29.188.852	32.503.991	34.783.640	37.476.757
Bali	2.469.930	2.777.811	3.151.162	3.890.757

Sumber: [bps.go.id](http://bps.go.id) diakses tanggal 5 April 2015 pukul 17.08 WIB ( data diolah)

Dengan Jumlah penduduk paling banyak nomor dua di Indonesia maka Provinsi Jawa Timur memiliki potensi dalam hal pembangunan. Di sisi lain, bila tidak dapat memanfaatkan besarnya jumlah penduduk tersebut maka dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sosial. Besarnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan kesempatan kerja yang besar akan mengakibatkan pengangguran, angka kriminalitas yang tinggi, kemiskinan dan lain sebagainya.

Provinsi Jawa Timur adalah provinsi yang terbagi atas beberapa kabupaten dan kota. Jika dihitung maka Jawa Timur memiliki 29 Kabupaten dan 9 kota. Namun dari sekian banyak kabupaten dan kota di Jawa Timur, ada beberapa kabupaten yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya, salah satunya adalah kabupaten Lumajang. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut.



Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
	2008	2009	2010	2011	2012
Lumajang	66,65	67,26	67,82	68,55	69,00
Jember	63,71	64,33	64,95	65,53	65,99
Banyuwangi	67,80	68,36	68,89	69,58	70,53
Bondowoso	61,26	62,11	62,94	63,81	64,98
Situbondo	63,06	63,69	64,26	64,67	65,06
Probolinggo	61,44	62,13	62,99	63,84	64,35

Sumber: [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id) diakses pada 5 April 2015 pukul 17.10 WIB (data diolah)

Data di atas menunjukkan IPM kabupaten dan kota di Jawa Timur. Terdapat 10 kabupaten/kota yang mempunyai IPM terendah. Kabupaten Lumajang berada pada nomor sembilan dengan IPM terendah di Jawa Timur dan nomor dua tertinggi se-karisedenan Besuki. Kabupaten Lumajang memiliki dua puluh satu kecamatan, salah satunya adalah Rowokangkung. Dari kedua puluh kecamatan di Lumajang, kecamatan Rowokangkung adalah salah satu kecamatan yang memiliki desa paling sedikit. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Desa menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang

Kecamatan	Jumlah			
	Desa	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Yosowilangun	12	31	71	401
Kunir	11	48	81	376
Candipuro	10	61	83	403
Pasirian	11	55	105	506
Tempeh	13	70	101	586
Randuagung	12	60	127	440
Rowokangkung	7	29	66	188
Senduro	12	50	115	392
Sukodono	10	44	94	363

Sumber: [lumajangkab.bps.go.id](http://lumajangkab.bps.go.id) pada 5 April 2015 pukul 17.14 WIB (data diolah)

Meskipun Kecamatan Rowokangkung memiliki jumlah desa yang sedikit, terdapat desa yang menonjol dan mendapatkan penghargaan sebagai pemenang lomba desa. Menurut wawancara dengan perangkat desa yang bernama Bapak Abdul Malik Huda pada tanggal 10 April 2015 pukul 18.00 WIB, Desa Sidorejo mempunyai prestasi yang cukup membanggakan. Berikut pernyataannya.

“Alhamdulillah dalam lomba desa yang kemarin, Sidorejo menang dek. Desa Sidorejo sebagai wakil dari Kecamatan Rowokangkung menang di tingkat kabupaten. Nanti Desa Sidorejo akan mewakili Kabupaten Lumajang di provinsi. Ya bisa dibilang Desa Sidorejo adalah desa terbaik di Lumajang.”

Namun selain prestasi yang cukup membanggakan tersebut, rendahnya keterlibatan pemuda dalam pembangunan desa juga di alami Desa Sidorejo. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu perangkat desa yang bernama Bapak Didik pada tanggal 1 Maret 2015 pukul 08.30 WIB. Beliau mengatakan sebagai berikut.

“Partisipasi masyarakat pada proses musrenbang kemarin sebenarnya sudah cukup bagus, hampir semua masyarakat ikut terlibat, mulai dari tokoh masyarakat, kepala dusun dan masih banyak yang lainnya. Tapi kalau dari pemuda desa sebenarnya bisa dibilang kurang. Meskipun demikian mereka juga tidak luput dari perhatian pemerintah desa dalam proses pembangunan”

Wawancara tersebut memberikan informasi kepada penulis bahwa meskipun pemuda mendapat perhatian pemerintah desa dalam proses pembangunan namun keterlibatannya rendah. Hal itu sangat disayangkan karena pemuda adalah salah satu faktor penting dari pembangunan. Generasi muda perlu aktif dan berpartisipasi dalam setiap usaha pembangunan, baik melalui ide-ide, kritik-kritik membangun maupun keterlibatan secara langsung terhadap program pembangunan yang sudah ada dan yang akan diadakan (Siagian, 1989:87). Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam Musrenbang Desa di Desa Sidorejo.

Pemuda yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

Adapun alasan tentang pentingnya pemuda dalam proses pembangunan dan tatanan masyarakat, yaitu:

- a. Kemurnian idealismenya
- b. Keberanian dan keterbukaannya dalam menerima nilai-nilai dan gagasan yang baru
- c. Semangat pengabdianya
- d. Spontanitas dan dinamikanya
- e. Inovasi dan kretivitasnya
- f. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
- g. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri
- h. Masih lengkapnya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Sumber: <http://academia.edu> diakses tanggal 30 Maret 2015 pukul 16.13 WIB

Mengingat jumlah pemuda yang besar di Indonesia maka sangat disayangkan jika besarnya jumlah itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan. Begitu pula di tingkat desa, dengan potensi yang dimiliki pemuda seharusnya hal tersebut dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan desa. Pemikiran mereka harus didengar dan kebutuhannya harus diperhatikan karena mereka adalah generasi penerus dan harapan di masa yang akan datang .

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Dengan itu, maka judul penelitian ini adalah **“Partisipasi Pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan salah satu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008:35). Rumusan masalah dibuat agar dalam pembahasan suatu karya ilmiah nantinya lebih mengarah pada obyek yang menjadi bahan kajian, hal ini dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan pembahasan, sehingga analisisnya dapat lebih terfokus. Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun 2015?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti memiliki tujuan, begitupun dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tahun 2015.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti berharap agar penelitiannya memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **a. Bagi peneliti**

Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

### **b. Bagi pemerintah desa**

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi Pemerintah Desa Sidorejo adalah sebagai masukan dan referensi mengenai partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

c. Bagi dunia akademis

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi dunia akademis adalah memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada konsentrasi Pemerintahan Daerah serta sebagai referensi guna memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian dengan topik yang sama.

## BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian landasan teori atau konsepsi dasar merupakan salah satu alat pedoman yang penting dalam membantu proses penelitian dan membantu memberi landasan pokok kerangka berpikir kepada peneliti dalam membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2008:81), “landasan teori ini perlu ditegakkan agar proses penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).” Sejalan dengan itu Singarimbun dan Effendi (1995:33) menjelaskan bahwa, “konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.” Keberadaan dari konsep dasar ini akan memberikan gambaran awal mengenai alur penelitian yang kemudian akan dijadikan analisis selanjutnya. Konsep dasar teori akan memudahkan peneliti dalam menghubungkan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sedang berkembang dan memberikan suatu gambaran awal mengenai langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada.

Keberadaan konsepsi dasar sangat penting dalam penelitian karena konsep digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan fenomena dan menentukan langkah-langkah pemecahan masalah dalam objek penelitian. Melalui konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dan memberi landasan pokok kerangka berpikir untuk membahas inti dari suatu penelitian. Dari penjelasan di atas maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan
2. Perencanaan Pembangunan Desa
3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)
4. Partisipasi
5. Partisipasi Pemuda

## 2.1 Pembangunan

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai sebuah proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam upaya perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang terencana dan agar perubahan yang dilakukan dapat mencapai sasaran maupun tujuan maka harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal. Dalam bahasa Inggris, kata pembangunan selaras dengan kata "*development*" yang berasal dari kata kerja "*to do develop*", yang artinya "menumbuhkan", "mengembangkan", "meningkatkan", atau "mengubah secara bertahap" (*to change gradually*). Dengan demikian, pembangunan dapat diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan (Conyers dan Hill dalam Huraerah, 2011:12). Masih dalam buku yang sama, menurut Budiman dalam Huraerah (2011:12), "kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya."

Siagian dalam Surjono dan Nugroho (2007:14), "pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*). Sedangkan Kartasasmita (1997:9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu, "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah upaya perubahan yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara berkesinambungan dan terencana untuk memajukan masyarakat dan mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pada umumnya, proses pembangunan pada suatu bangsa dilaksanakan berdasarkan paradigma pembangunan, dalam buku Tjokrowinoto yang berjudul "*Pembangunan: Dilema dan Tantangan*" pada halaman 216 terdapat tiga paradigma pembangunan sebagai berikut.

1. Paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan (*production centered development*)
2. Paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan (*welfare paradigma*)
3. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*).

Sedangkan perbedaan di antara ketiga paradigma tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Karakteristik Tiga Paradigma Pembangunan

Karakteristik	Paradigma Pembangunan		
	Pertumbuhan	Kesejahteraan	People-Centered
Fokus	Industri	Pelayanan	Manusia
Nilai	Berpusat pada industri	Berorientasi pada manusia	Berpusat pada manusia
Indikator	Ekonomi makro	Indikator Sosial	Hubungan manusia dan sumber
Peranan pemerintah	Enterpreneur	Pemberi layanan	Pembina kemampuan atau fasilitator
Sumber utama	Modal	Kemampuan administratif dan anggaran	Kreativitas dan komitmen
Kendala	Konsentrasi dan marginalisasi	Keterbatasan anggaran dan inkompetensi aparat	Struktur dan prosedur yang tidak mendukung

Sumber: Tjokrowinoto (1996:216)

1. Tjokrowinoto (1996:216) menyebutkan mengenai karakteristik dari paradigma pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan (*production centered development*) sebagai berikut.
  - a. Berorientasi pada peningkatan taraf hidup yang diukur dari kenaikan nilai ekonomi barang dan jasa yang diproduksi serta kenaikan tingkat konsumsi masyarakat



- b. Konsentrasi pemilikan alat produksi
  - c. Dominasi mekanisme pasar dalam menentukan jenis, kuantitas dan kualitas barang dan jasa yang diproduksi
  - d. Optimalisasi pemanfaatan kapital
  - e. Sistem perencanaan yang sentralistis.
2. Komitmen dari paradigma pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan (*welfare paradigm*) adalah melaksanakan sejumlah besar program yang akan mengantarkan buah pembangunan kepada sebagian anggota masyarakat dalam waktu yang sesingkat mungkin, melalui jalur yang selangsung mungkin, terutama sekali dengan cara meningkatkan akses mereka kepada berbagai pelayanan publik dan penyuluhan. Tjokrowinoto (1996:217) menyebutkan mengenai kelemahan paradigma kesejahteraan sebagai berikut.
- a. Program-program kesejahteraan yang didesain, dibiayai dan dikelola secara sentralistis ini memerlukan biaya yang amat mahal untuk dapat berhasil, lebih dari apa yang ditanggung oleh birokrasi.
  - b. Program-program kesejahteraan semacam ini terlalu menguntungkan pelaksanaannya pada manajemen birokrasi yang tegar dan tidak lentur yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Sebaiknya rakyat harus menyesuaikan diri dengan apa yang akan diberikan oleh birokrasi.
3. Paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*) memberikan peranan kepada individu bukan sebagai subjek akan tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka (Tjokrowinoto, 1996:218). Paradigma ini memberikan tempat yang penting bagi prakarsa dan beragaman lokal, selain itu paradigma ini menekankan masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Korten dalam Supriatna (2009:209) mengemukakan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia ini, dalam

pelaksanaannya sangat mensyaratkan keterlibatan langsung pada masyarakat penerima program pembangunan karena hanya dengan partisipasi masyarakat penerima program maka hasil pembangunan ini akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberi manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat penerima program.

Selanjutnya Tjokrowinoto dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:18) memberikan deskripsi mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia) sebagai berikut.

*Pertama*, prakarsa dan proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat sendiri;

*Kedua*, Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka;

*Ketiga*, pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan karenanya, sifatnya fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal;

*Keempat*, di dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang di dalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan diri saling belajar;

*Kelima*, proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan-satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal maupun horizontal. Melalui proses *networking* ini diharapkan terjadi simbiose antara struktur-struktur pembangunan di tingkat lokal.

Pembangunan yang berpusat pada rakyat menekankan bahwa manusia adalah sasaran pokok dan sumber paling strategis. Karena itu, pembangunan juga meliputi usaha terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia

serta mengarahkan minat mereka untuk ikut serta dalam proses pembuatan keputusan tentang berbagai hal yang memiliki dampak bagi mereka dan mencoba mempromosikan kekuatan manusia, bukan mengabadikan ketergantungan yang menciptakan hubungan antara birokrasi negara dengan masyarakat.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa inti dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, dimensi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena melalui partisipasi, kemampuan masyarakat dan perjuangan mereka untuk membangkitkan dan menopang pertumbuhan kolektif menjadi kuat. Tetapi partisipasi di sini bukan hanya berarti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan atau masyarakat hanya ditempatkan sebagai “obyek”, melainkan harus diikuti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan dan proses perencanaan pembangunan, atau masyarakat juga ditempatkan sebagai “subyek” utama yang harus menentukan jalannya pembangunan. Oleh karena itu peneliti menggunakan paradigma pembangunan yang berpusat kepada manusia.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam seluruh proses pembangunan. Sedangkan pembangunan yang baik memerlukan perencanaan yang matang agar nantinya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan perencanaan sendiri merupakan alur maupun rentetan kegiatan guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan harus bersifat *top down* dan *bottom up*, artinya perencanaan di tingkat bawah harus berpedoman pada perencanaan di tingkat atasnya dan perencanaan di tingkat bawah sendiri berfungsi sebagai masukan terhadap penetapan perencanaan di tingkat atas. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perencanaan pembangunan ditingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu desa karena mayoritas masyarakat Indonesia bertempat tinggal di desa maka dengan membangun desa sama halnya dengan membangun bangsa.

## 2.2 Perencanaan Pembangunan Desa

### 2.2.1 Perencanaan

Menurut Siagian (1994:108), “perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Sedangkan Waterson dalam Conyers (1994:4) mengatakan bahwa pada hakikatnya perencanaan adalah usaha sadar terorganisir dan terus-menerus dilakukan guna memilih alternatif terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk merencanakan apa-apa yang hendak dilaksanakan di masa yang akan datang dan perencanaan digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang ada mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka perencanaan diperlukan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Abe (2005:31), dalam melakukan suatu perencanaan yang baik maka harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Apa yang akan dilakukan, yakni jabaran misi dan visi;
- b. Bagaimana mencapai hasil tersebut;
- c. Siapa yang akan melakukan;
- d. Lokasi aktifitas;
- e. Kapan akan dilakukan dan berapa lama;
- f. Sumber daya yang dibutuhkan.

Lebih lengkap pendapat yang dikemukakan oleh Syamsi dalam Surjono dan Nugroho (2008:84), bahwa perencanaan yang baik dan lengkap harus memenuhi 6 (enam) unsur sebagai berikut.

- 1) Apa (*what*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan;
- 2) Mengapa (*Why*), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan;

- 3) Bagaimana dan berapa (*how and how much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dan dengan dana yang tersedia harus dipertimbangkan;
- 4) Dimana (*where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan (proyek);
- 5) Kapan (*when*), yaitu pemilihan waktu/timing yang tepat dalam pelaksanaannya;
- 6) Siapa (*who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan subyek pelaksana. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa yang menjadi obyek pelaksana kegiatan.

Dalam merencanakan pembangunan maka *stakeholder* utama adalah masyarakat karena masyarakat adalah sasaran utama pembangunan itu sendiri, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka pembangunan diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat karena sejatinya, masyarakatlah yang paling mengetahui tentang permasalahan yang mereka hadapi. Maka dari itu untuk menetapkan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, berapa, siapa yang melaksanakan dan menjadi sasaran pembangunan maka dalam perencanaan wajib hukumnya melibatkan masyarakat.

### **2.2.2 Pembangunan Desa**

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan bahwa Desa mempunyai otonomi dan berhak mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang bersifat lokal dengan tetap mengacu pada pemerintahan di atasnya. Hal ini diperjelas pada pasal 1 Undang-Undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakatnya setempat. Selanjutnya, Pembangunan Desa menurut Adisasmita (2006:4) adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya dan gotong royong. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Lebih lanjut, Adisasmita (2006:18) mengemukakan tujuan pembangunan desa sebagai berikut.

- a. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi perusahaan nasional;
- b. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam; Tujuan pembangunan desa secara parsial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, sinergi dan serasi dengan kawasan-kawasan yang lain. Akan tetapi pada hakikatnya tujuan umum dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pencapaian kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*).

Selain itu, Adisasmita juga mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan desa yang seharusnya menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Transparansi;
- b. Partisipatif;
- c. Dapat dinikmati masyarakat;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Berkelanjutan.

Berangkat dari penjelasan di atas maka pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat desa secara gotong royong dan kekeluargaan dengan menumbuhkan semangat swadaya untuk melakukan perubahan demi terciptanya masyarakat desa yang lebih sejahtera dan berkualitas. Namun satu hal yang perlu diingat di dalam proses pembangunan, agar pembangunan itu dapat berhasil dan berjalan sesuai kehendak maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan yang baik karena tahap awal dari semua proses pembangunan adalah perencanaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses kegiatan masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintahan desa untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan, kapan pelaksanaannya, bagaimana melaksanakannya dan lain-lain, dimana kesemua hal tersebut bertujuan untuk memajukan masyarakat dan mengubah desa menjadi lebih baik.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pada sebuah forum yang biasa disebut dengan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Di dalam Musrenbang dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan jangka waktu satu tahun. Hasil dari RPJM Desa dan RKP Desa akan dipakai sebagai acuan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

### **2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)**

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) adalah sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP Desa harus didasarkan dan mengacu pada RPJM Desa. Dalam penyusunannya setiap elemen desa baik pemerintah desa maupun seluruh lapisan masyarakat harus terlibat agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan daftar keinginan elit desa belaka.

Adapun petunjuk teknis/penyelenggaraan Musrenbang didasarkan pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) terdiri dari dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Forum musyawarah tersebut harus melibatkan masyarakat desa, yang artinya perencanaan pembangunan desa harus bersifat partisipatif.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan semua elemen masyarakat. Oleh karena itu masyarakat harus berpartisipasi di dalam proses perencanaan pembangunan desa agar nantinya pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat.

#### **2.4 Partisipasi**

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris, "*participation*" yaitu pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Bank Dunia mendefinisikan partisipasi sebagai suatu proses dimana setiap *stakeholders* mempengaruhi dan membagi pengawasan pada inisiatif pembangunan dan keputusan serta sumberdaya yang mempengaruhi mereka (Saragi, 2004:50). Sedangkan Mubyarto mengartikan partisipasi sebagai tindakan mengambil bagian dalam kegiatan, sedangkan partisipasi masyarakat sendiri adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan dimana masyarakat ikut terlibat mulai dari tahap penyusunan program, perencanaan dan pembangunan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan (Huraerah, 2011:110). Sejalan dengan itu, Sulaiman mengungkapkan partisipasi sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat secara perorangan, kelompok, atau dalam kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program serta usaha pelayanan dan pembangunan kesejahteraan sosial di dalam dan atau di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran tanggung jawab sosialnya (Huraerah, 2011:110).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan partisipasi sebagai "keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka



dalam proses penyusunan rencana pembangunan”. Masyarakat didefinisikan sebagai “orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko” (Sukardi, 2009: 255). Dengan demikian, partisipasi merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat untuk dapat terlibat dan memengaruhi sebuah kebijakan meskipun tidak benar-benar sangat menentukan (Muluk, 2007:63).

Tjokrowinoto (1995:48) mengemukakan alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut.

- 1) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
- 2) Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
- 3) Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;
- 4) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
- 5) Partisipasi memperluas *zone* (kawasan) penerimaan pembangunan;
- 6) Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;
- 7) Partisipasi menopang pembangunan;
- 8) Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
- 9) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
- 10) Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat berarti keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi terhadap pembangunan itu sendiri. Meskipun tidak benar-benar

sangat menentukan kebijakan yang dihasilkan namun partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan karena dengan partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan akan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta diorientasikan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat itu sendiri.

#### **2.4.1 Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Yadaf dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:82) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat dan lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan perlu ditumbuhkan terhadap program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat miskin yang menyumbangkan tenaganya dalam pembangunan sedangkan orang-orang kaya lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri dan tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, uang dan lain sebagainya yang sepadan dengan manfaat yang akan diperoleh masing-masing masyarakat.

c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan agar tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dicapai seperti yang diharapkan. Dengan melakukan hal ini diharapkan

akan memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan juga penting karena tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Dalam penelitian ini, partisipasi pemuda dalam Musrenbang Desa berada pada lingkup partisipasi dalam pengambilan keputusan.

#### **2.4.2 Jenis dan Bentuk Partisipasi**

Nelson dalam Ndraha (1990:102) mengemukakan pendapatnya tentang jenis-jenis partisipasi sebagai berikut.

“Ada dua jenis partisipasi yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, atau antara masyarakat dengan pemerintahan yang diberi nama partisipasi vertikal.”

Sedangkan Bryant dan White dalam Ndraha (1990:102) berpendapat sebagai berikut.

“Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan sebagainya disebut partisipasi dalam proses politik, sedangkan keterlibatan dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administratif.”

Dusseldorp dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sebagai berikut.

- 1) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
- 2) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
- 3) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain

- 4) Menggerakkan sumberdaya masyarakat
- 5) Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- 6) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Sedangkan Hamijoyo dan Iskandar dalam Huraerah (2011:116) menyebutkan mengenai lima kriteria bentuk partisipasi masyarakat sebagai berikut.

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat;
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya;
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya;
- d. Partisipasi ketrampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri;
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layat (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan, mulang sambung.

### 2.4.3 Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut *Asia Development Bank* dalam Huraerah (2011:114), tingkatan partisipasi ada empat sebagai berikut.

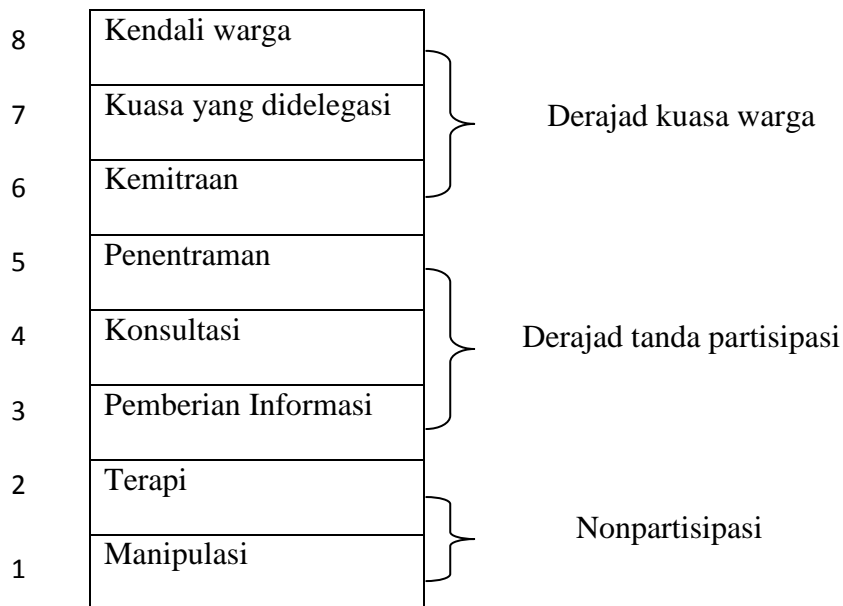
- a. Berbagi Informasi bersama (sosialisasi)  
Pemerintah hanya menyebarluaskan informasi tentang program yang akan direncanakan atau sekedar memberikan informasi mengenai keputusan yang dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut;
- b. Konsultasi/mendapat umpan balik  
Pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan;
- c. Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama  
Masyarakat bukan sebagai penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan dapat memengaruhi hasil/keputusan;

d. Pemberdayaan/kendali

Masyarakat memiliki kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka tetapkan bersama.

Sedangkan Arnstein dalam Muluk (2007:57-59) memberikan delapan model tangga partisipasi masyarakat yang digunakan untuk mengukur kadar partisipasi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan *ladder of participation* (tangga partisipasi). Menurutnya, terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian dikerutkan lagi dan diperinci dalam delapan anak tangga partisipasi sebagai berikut.

- a. Derajat pertama dan paling rendah adalah nonpartisipasi. Aktivitas pada tahap ini sebenarnya merupakan distorsi partisipasi, tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan, dan di dalam derajat ini terdapat dua anak tangga yaitu manipulasi dan terapi.
- b. Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan warga dalam derajat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat sebelumnya. Praktik partisipasi dalam pemerintahan daerah paling banyak terjadi pada derajat yang meliputi tiga anak tangga ini, yakni pemberian informasi, konsultasi, dan penentraman (*placation*).
- c. Derajat ketiga adalah kendali warga yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan. Warga ambil bagian secara langsung baik pengambilan keputusan maupun pelayanan publik. Derajat ini menunjukkan adanya retribusi kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Terdapat tiga anak tangga dalam derajat ini mulai dari kemitraan, kuasa yang didelegasikan, sampai pada yang tertinggi yakni kendali warga. Berikut ini model tingkat partisipasi masyarakat menurut Arnstein.



Gambar 2.1 Tangga Partisipasi Sherry R. Arnstein dalam Muluk (2007:59)

#### 1. Manipulasi

Tingkat partisipasi terendah yang memposisikan masyarakat hanya sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasihat. Tujuan sebenarnya tidak untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan rencana dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan pemegang kuasa sekedar mendidik dan menyenangkan partisipan. Dalam hal ini tidak ada partisipasi yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

#### 2. Terapi

Dalam tingkatan ini, para ahli memperlakukan masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan namun pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah

#### 3. Pemberian Informasi

Pemberian Informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun yang

sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam situasi saat ini terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memengaruhi rencana.

#### 4. Konsultasi

Dalam tingkat ini, pemegang kuasa telah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengundang opini mereka. Masyarakat juga telah dilibatkan dalam dialog dua arah dengan pemegang kuasa namun masih tidak ada jaminan bahwa ide maupun gagasan yang disampaikan oleh masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering digunakan adalah survei, temu warga, dan dengar pendapat masyarakat.

#### 5. Penentraman

Pada tingkat ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

#### 6. Kemitraan

Pada tingkat ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggungjawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah. Telah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

#### 7. Kuasa yang didelegasi

Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang ada, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Pada tahap ini masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.

#### 8. Kendali warga

Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini, usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya sendiri.

Teori dari Arnstein dirasa paling cocok untuk mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Alasan peneliti menggunakan teori dari Arnstein juga didasari oleh pendapat Burn, Hambleton dan Hogget dalam Muluk (2007:60) yang menyatakan bahwa tangga partisipasi Arnstein terpusat pada analisis hubungan antara masyarakat dengan program pemerintah. Selain itu, Teori Arnstein menunjukkan kadar partisipasi masyarakat dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan desa yang dibuat oleh pemerintah desa (Rahman, 2012:29). Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti menggunakan teori Arnstein untuk mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Tahun 2015.



## 2.5 Partisipasi Pemuda

### 2.5.1 Pemuda

Secara Internasional, *World Health Organization* (WHO) menyebut pemuda sebagai *young people* dengan batas usia 10 sampai 24 tahun. Dalam *International Youth Year* yang diselenggarakan tahun 1985 mendefinisikan pemuda sebagai penduduk yang berusia 15 sampai 24 Tahun. (Sumber: [slidesahre.com](http://slidesahre.com), diakses pada 3 Mei 2015 pukul 05.00 WIB). Sedangkan Gerakan Pemuda Anshor mengartikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia 20 sampai 45 tahun. (Sumber: [kompasiana.com](http://kompasiana.com), diakses pada 5 Mei 2015 pukul 16.30 WIB).

Tidak banyak definisi yang mengartikan tentang pemuda namun secara umum pemuda adalah mereka yang berada pada kelompok umur 10-24 tahun (Siagian, 1989:72). Sedangkan batasan umur yang dipakai peneliti untuk mendefinisikan pemuda adalah umur 16 sampai dengan 30 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 1.

“Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun.”

Sesuai dengan dasar hukum tersebut maka yang dimaksud pemuda dalam penelitian ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Selain itu, pengertian pemuda dapat dilihat dari dua segi yaitu biologis dan ideologis. Pemuda secara biologis adalah manusia yang berada pada masa pertumbuhan dan batasan umur tertentu. Sedangkan pemuda secara ideologis adalah manusia yang mempunyai pikiran, semangat dan jiwa muda. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Kepemudaan maka peneliti mendefinisikan pemuda dari segi biologis. Dengan begitu, maka semua warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang berusia 16 sampai 30 tahun dapat dikatakan sebagai pemuda.

Pemuda merupakan generasi bangsa yang harus dibina dan didik sehingga kelak mereka mampu memimpin dan membangun negara. Di sisi lain, pemuda diharapkan sadar akan besarnya tanggungjawab dan tugasnya sehingga mereka

mempersiapkan diri untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Namun anggapan yang berkembang selama ini adalah bahwa pemuda tidak mempunyai andil yang berarti dalam proses pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Pemuda dianggap sebagai obyek dari penerapan pola-pola kehidupan yang banyak sedikitnya telah ditentukan. Seharusnya pemuda sebagai bagian dari warga masyarakat harus dipandang sebagai subyek sehingga mereka mempunyai nilai-nilai sendiri dalam mendukung proses pembangunan.

Terdapat dua pandangan untuk melihat besarnya jumlah pemuda di Indonesia (Siagian, 1989:80).

- 1) Menambah angkatan kerja, sehingga dapat mendorong atau menunjang pelaksanaan usaha-usaha pembangunan
- 2) Menambah beban pemerintah dalam rangka pembiayaan yang diperlukan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan penyediaan lapangan kerja yang mereka butuhkan.

Besarnya jumlah pemuda di Indonesia seharusnya mampu dimanfaatkan dalam proses pembangunan terutama pembangunan di desa.

### **2.5.2 Partisipasi Pemuda**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pasal 16 menyebutkan bahwa salah satu peran pemuda adalah sebagai agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Artinya pemuda adalah seorang/kelompok yang diharapkan mampu membawa perubahan dan harus terlibat dalam proses pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan merupakan keikutsertaan pemuda untuk berkontribusi secara fisik maupun non fisik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil (Solekhan, 2014:144).

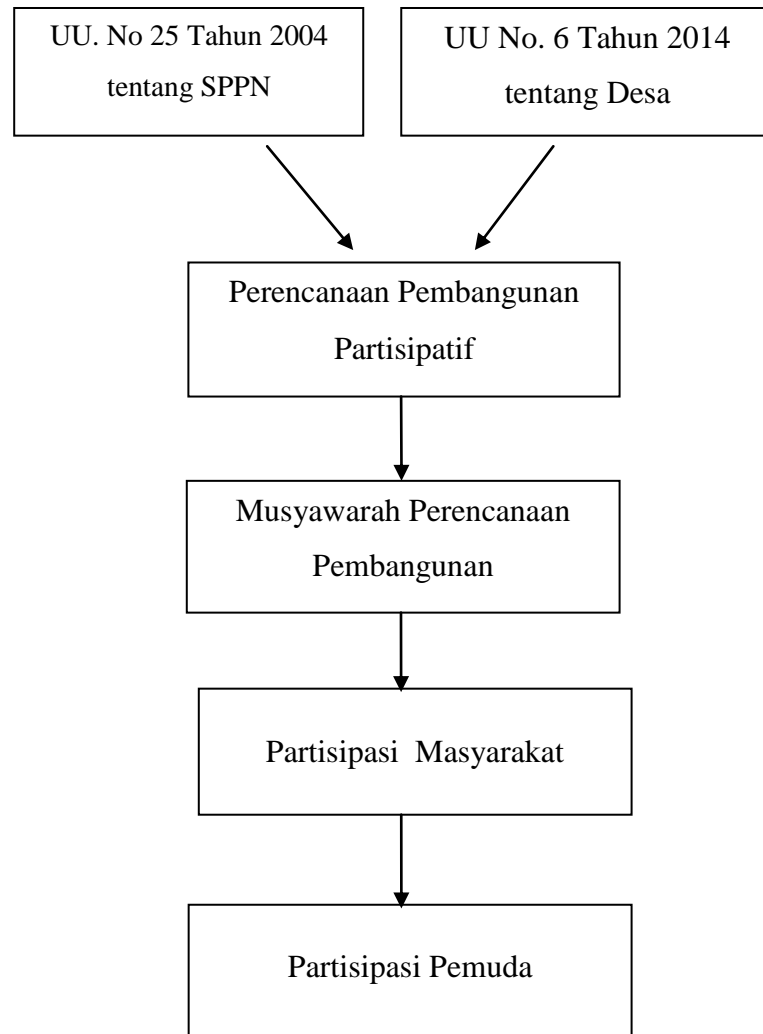
Hal di atas menjelaskan bahwa partisipasi pemuda merupakan keterlibatan pemuda dalam suatu kegiatan, baik keterlibatannya melalui tenaga, pikiran dan biaya. Jika dilihat dari konteks pembangunan desa maka yang dimaksud dengan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa adalah keterlibatan pemuda baik secara fisik maupun non fisik secara bersama-sama dengan aktor yang lain dalam usaha membangun desa.

Dari segi kesempatan sebenarnya kesempatan kerja bagi pemuda lebih banyak jika dibandingkan dengan kelompok umur di atasnya karena pemuda adalah manusia yang mempunyai tenaga, penuh cita-cita dan dinamika. Namun yang menjadi persoalan adalah sampai sejauhmana keterlibatan mereka jika diukur dengan potensi yang seharusnya. Terlebih lagi, terdapat tingkat perbedaan mengenai potensi keterlibatan pemuda pedesaan dengan pemuda perkotaan dalam suatu pembangunan. Partisipasi pemuda pedesaan dalam kerja cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemuda yang berada di perkotaan, tinggal pemanfaatannya secara terarah dan terencana agar pemuda pedesaan dapat lebih produktif dan lebih berperan dalam menunjang pembangunan. Namun pada kenyataannya pemuda kurang dimanfaatkan potensinya untuk pembangunan, terlebih dalam pembangunan desa. Hal tersebut bisa disebabkan oleh pemuda yang tidak aktif maupun dari pemerintahan desa yang tidak memberikan kesempatan bagi pemuda untuk ikut andil dalam proses pembangunan.

Menurut Siagian (1989:100), pemuda sebagai generasi penerus bagi pembangunan desa, mereka perlu diikutsertakan dalam memikirkan, merencanakan dan memutuskan apa yang hendak dibangun oleh desa. Karena itu dalam setiap pertemuan atau rembug desa yang diadakan, unsur pemuda perlu diikutsertakan dan sebaiknya pendapat dan saran mereka diminta serta diperhatikan. Kalau hal ini dilakukan maka dengan sendirinya pemuda akan merasa jika mereka dihargai dan hal ini akan berdampak baik karena mereka akan senang untuk ikut serta dalam segala kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hal tersebut menjelaskan bahwa partisipasi pemuda sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan desa karena mereka adalah generasi penerus yang harus dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Dengan melibatkan pemuda maka akan muncul "*Sense of belonging*" yaitu perasaan ikut memiliki pembangunan desa. Pada akhirnya, partisipasi pemuda diharapkan mampu memberikan "warna yang berbeda" dan "angin segar" dalam perencanaan pembangunan desa.

## 2.6 Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Menurut Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:22) metode penelitian merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas. Pada metodologi penelitian dapat diuraikan tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan informan, definisi operasional, hipotesis dan uraian lain yang diperlukan. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi penelitian merupakan hal yang dipersiapkan peneliti sebelum melakukan penelitian untuk menentukan metode atau cara yang digunakan ketika melakukan penelitian di lapangan. Dalam mencari kebenaran atas suatu permasalahan maka metodologi penelitian ini mutlak dibutuhkan. Metodologi penelitian merupakan cara ilmiah untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan penelitian.

Pada metodologi penelitian terdapat teknik-teknik yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian. Teknik dan hal-hal tersebut dapat dijelaskan di bawah ini.

1. Jenis penelitian;
2. Fokus penelitian;
3. Tempat dan waktu penelitian;
4. Data dan sumber data;
5. Teknik pemilihan informan;
6. Teknik dan instrumen pengumpulan data;
7. Teknik menguji keabsahan data;
8. Teknik analisis data.

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menurut buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2011:22) merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif

menurut Moleong (2004:6) penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:20), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif, strategi, dan model yang dikembangkan sangat beragam.

Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam Imam Gunawan (2013:82), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).

Sesuai dengan Bogdan dan Taylor, Kirk dan Miller dalam Basrowi & Suwandi (2008:21) menyatakan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Lebih lanjut, Creswell (2009) dalam Imam Gunawan (2013:82) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi dan perubahan, atau keduanya).

Kemudian deskriptif menurut Nawawi (1998:63) merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Imam Gunawan (2013:87), penelitian kualitatif sifatnya *deskriptif analitik*. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil

pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2015.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:28), penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Bagaimanapun fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam usaha menemukan batas penelitian oleh karena itu, dengan fokus permasalahan yang tajam, peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian dengan tepat.

Dalam penelitian kualitatif, terdapat tujuan tertentu ketika menentukan fokus penelitian. Menurut Moleong (2000:62), ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu presis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang, walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Fokus penelitian ini adalah partisipasi pemuda dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) di Desa Sidorejo yang terdiri dari dua tahap yaitu persiapan dan pelaksanaan. Penentuan fokus ini bertujuan agar penelitian ini dapat terarah dan mempunyai cakupan yang jelas sesuai dengan judul penelitian.

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

Berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Tempat penelitian yaitu di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Sedangkan waktu penelitian adalah bulan Agustus-Oktober tahun 2015.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian, data menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh peneliti dalam menunjang pemecahan masalah penelitian. Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2011:23), data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Berdasarkan pendapat Lofland dan Lofland yang dikutip dalam Moleong (2004:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut sumber perolehannya, sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau objek yang akan diteliti. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama, misalnya dari individu atau perseorangan. Data primer adalah data individu atau kelompok berbentuk angket, wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan terkait partisipasi pemuda dalam Musrenbang Desa. Proses wawancara guna memperoleh data dilakukan kepada Pemerintahan Desa dan Pemuda yang terlibat dalam Musrenbang Desa di Desa Sidorejo

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dapat memberikan informasi bagi peneliti, misalnya melalui dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar hadir Musrenbang Desa,



hasil Musrenbang Desa, foto Musrenbang Desa, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 40 Tahun 2009, PP No. 43 Tahun 2014, Surat edaran kepala Bappenas dan Mendagri Tahun 2007 dan lain-lain.

### **3.5 Teknik Pemilihan Informan**

Peneliti dalam memperoleh data yang valid dalam melakukan penelitiannya, dibutuhkan sumber yang kompeten dan ahli dibidangnya. Orang yang kompeten tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan. Menurut Moleong (2000:90), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi (Lincoln dan Guba, 1985). Kemudian dalam menentukan informan, harus dipenuhi beberapa kriteria sehingga informan tersebut benar-benar orang yang tepat dan memahami masalah penelitian ini. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2011:221), kriteria informan adalah sebagai berikut.

1. Orang yang mampu memahami suatu masalah yang diteliti dengan proses enkulturisasi yaitu proses penghayatan bukan proses mengetahui.
2. Orang yang masih berkecimpung dalam masalah yang diteliti.
3. Orang yang memiliki waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Orang yang mampu menyampaikan informasi secara lebih objektif bukan berdasarkan subjektifitas.
5. Orang yang masih baru dikenal oleh peneliti sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai narasumber atau guru dalam penelitiannya.

Teknik penentuan informan yang dipilih oleh peneliti adalah menggunakan *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2011:85), teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan yang didasari atas pertimbangan tertentu. Dengan teknik *purposive sampling* penentuan infoman didasarkan pada tujuan penelitiannya, yang menjadi sampel hanyalah sumber yang relevan saja.

Informan dari penelitian ini adalah.

- a. Kepala Desa Sidorejo, Bapak Heru Subiantoro
- b. Sekteraris Desa Sidorejo, Bapak Edi Supriyanto
- c. Perangkat desa Sidorejo, Bapak Malik, Bapak Didik, Bapak Subari, Bapak Jaenuri, Bapak Suwanto, Bapak Tumiarno
- d. Ketua dan anggota BPD, Bapak Sutanto dan Bapak Nanang
- e. Pemuda desa Sidorejo, Restu, Joni, Ridwan, Rohmat, Helly, Agus, dan Yuli
- f. Tokoh masyarakat, Bapak Joko, Bapak Murtaib, Bapak Haji Pujianto dan Bapak Sugeng

### **3.6 Teknik dan Instumen Pengumpulan Data**

Data penelitian kualitatif diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan noninteraktif (Mantja dalam Imam Gunawan, 2013:142). Teknik interaktif terdiri dari wawancara dan pengamatan berperan serta, sedangkan noninteraktif meliputi pengamatan tak berperan serta, analisis dengan perilakunya, peristiwa, arsip, dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian deskriptif kualitatif ini adalah sebagai berikut.

#### **a. Wawancara**

Dalam Basrowi dan Suwandi (2008:127), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Sementara itu menurut Kerlinger (1986) dalam Imam Gunawan (2013:162) wawancara adalah situasi peran antar pribadi berhadapan muka (*face to face*), ketikan seseorang (yakni pewawancara) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancarai, atau informan.

Menurut Guba dan Lincoln dalam Basrowi dan Suwandi (2008:128), wawancara dibagi menjadi:

- a. Wawancara oleh tim atau panel
- b. Wawancara tertutup atau wawancara terbuka (covert dan overt)
- c. Wawancara riwayat secara lisan
- d. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

Dalam wawancara, terdapat beberapa tipe yang membedakan wawancara yang akan dilakukan. Menurut Imam Gunawan (2013:162), tipe wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali secara mendalam ide dan gagasan informan secara terbuka (Sugiyono dalam Imam Gunawan, 2013:163).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menggali sedalam-dalamnya informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga informan dapat menjawab dengan leluasa pertanyaan dan informasi yang dibutuhkan peneliti.

#### b. Dokumentasi

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:158), dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Kemudian Bungin dalam Imam Gunawan (2013:177), teknik dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar hadir Musrenbang Desa, hasil Musrenbang Desa, foto Musrenbang Desa, UU No. 25

Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 40 Tahun 2009, PP No. 43 Tahun 2014, Surat edaran kepala Bappenas dan Mendagri Tahun 2007 dan lain-lain.

### **3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data**

Data yang diperoleh peneliti merupakan unsur penting yang perlu dijaga keabsahannya. Penelitian merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu masalah, sehingga keabsahan data yang diperoleh harus benar-benar valid dan dapat dipercaya kebenarannya dan mampu menggambarkan realita yang ada. Teknik pemeriksaan keabsahan data menurut Moleong (2000:175) terdiri dari ketekunan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, dan uraian rinci.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengutamakan teknik pemeriksaan data dengan menggunakan teknik triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi. Tujuannya yakni agar penelitian dapat memiliki derajat keabsahan dan tingkat validasi yang akurat sehingga dapat benar-benar dipertanggungjawabkan.

#### **1. Triangulasi**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin dalam Moleong (2000:178) triangulasi dibedakan empat macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yakni dengan mengecek keabsahan sumber data yang diperoleh peneliti berdasarkan waktu dan alat yang berbeda atau dengan membandingkannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari wawancara bersama informan maupun dari dokumentasi serta kapan data diperoleh.

#### **2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos atau mempublikasikan hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini dilakukan dengan cara diskusi dengan rekan, seminar

proposal dan konsultasi bersama dosen pembimbing tentang penelitian yang dilakukan.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008:192), analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua pertanyaan pokok: (1) tema apa yang dapat ditemukan pada data-data ini, dan (2) seberapa jauh data-data ini dapat menyokong tema tersebut?.

Menurut Imam Gunawan (2013:209), analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Kemudian analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen dalam Basrowi dan Suwandi (2008:193) merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknis analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Imam Gunawan (2013:210) yakni teknik analisis data model interaktif. Adapun tahapan teknik analisis data model interaktif adalah sebagai berikut.

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, dalam Imam Gunawan 2013:211). Data yang akan direduksi akan memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data mengenai partisipasi pemuda dalam Musrenbang Desa, pihak yang hadir dalam Musrenbang Desa, hasil Musrenbang Desa dan data lainnya yang mendukung.